

ISLAM KANAN: GERAKAN DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA

Ismatilah A. Nu'ad

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ismatillahnuad2@gmail.com

Abstrak

Menilik dinamika Islam, apalagi dalam konteks keindonesiaan adalah salah satu kegiatan yang menggairahkan. Sebab dalam belantika sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya menjelang reformasi sampai sekarang ini telah mengalami berbagai pergulatan. Pascareformasi, secara beruntun muncul banyak sekali gerakan Islam Kanan (MMI, HTI, FPI, gerakan Tarbiyah, Jamaah Tabligh dsb) yang sebelumnya tak berani memunculkan geliatnya. Mereka muncul untuk menawarkan solusi atas krisis multidimensi yang mendera bangsa ini dengan konsep kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Namun dewasa ini, gerakan Islam Kanan sudah mengalami transformasi. Perbedaan yang cukup signifikan adalah sikap garang dan reaksionernya terhadap pluralitas bangsa Indonesia. Berangkat dari realitas tersebut, dengan berbekal literatur dan pengamatan penulis di lapangan, artikel ini akan menelisik dinamika dan orientasi gerakan Islam Kanan dan bagaimana sepak terjangnya dalam memandang demokrasi di Indonesia dewasa ini.

[Watch the dynamic of Islam, especially in the Indonesian context is one activity that is exciting. Because in the history of Islam in Indonesia, especially ahead of the reforms have been subjected to various struggles until now. Post-reform, Islamic Rights movements (MMI, HTI, FPI, Tarbiyah Movement, Jamaah Tabligh, etc.) that appears. Previously they did not dare bring up existence. They appear to offer a solution to the multidimensional crisis besetting the

nation with the concept back to the Qur'an and sunnah. But the Islamic Right movement has transformation today. The significant differences is fierce and reactionary attitude to the plurality of Indonesian. Based on this reality, sourced from literature and the author's observation in the field, this article will probe the dynamic and orientation Islamic Right movement and how his behavior was in looking at democracy in Indonesia today.]

Kata kunci: *Islam Kanan, Indonesia, Demokrasi*

Pendahuluan

Krisis multidimensi yang dialami bangsa ini semenjak tahun 1997 yang hingga kini belum mampu diatasi sepenuhnya oleh negara, membuat kepekaan sosial, politik dan ekonomi kian tumbuh dalam masyarakat Islam, apalagi seiring dengan terbukanya katup demokratisasi setelah rezim Orde Baru terjungkal dari kekuasaannya. Kepekaan yang kian tumbuh itu lalu terejawantah dalam bentuk gagasan dan pemikiran, ekspresi, serta tindakan, yang diwakili baik oleh individu maupun gerakan masif. Dalam dataran yang lebih progresif, keterwakilan masyarakat Muslim dalam merespon persoalan-persoalan sosial, politik dan ekonomi akibat dari krisis multidimensi, direpresentasi oleh para aktivis gerakan yang ada di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, SI, al-Wasliyah, DDII, LDII, MMI, FPI, HTI, Tarbiyah, dan Jamaah Tabligh.

Pada intinya, respon yang dilakukan aktivis Islam merupakan sebetuk kritik terhadap ketidakberdayaan negara dalam mengelola tata kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang baik. Sebagai akibatnya, bahkan beberapa dari aktivis Islam, mencoba menawarkan gagasan yang sama sekali baru dari apa yang selama ini dipikirkan oleh negara, yaitu sebetuk solusi yang secara menyeluruh harus berangkat dari paradigma Islam *an sich*, yang lazimnya berangkat dari dua sumber Islam, yaitu al-Qur'an dan *sunnah*. Namun, ada pula dari aktivis Islam yang lebih toleran dan fleksibel dengan gagasan yang selama ini dipikirkan oleh negara,

dalam dataran itu, respon yang dilakukan aktivis tipikal ini, hanyalah sebatas kritik dan saran yang membangun, namun tidak keluar dari *mainstream* pemikiran dan paradigma negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun mereka aktivis Islam yang responnya lebih reaksioner terhadap negara, lazimnya muncul dari organisasi keagamaan yang boleh dikatakan baru, atau paling tidak ormas yang muncul paska rezim Soeharto lengser dari kekuasaan presiden bulan Mei tahun 1998, seperti MMI, HTI, FPI dan Gerakan Tarbiyah. Sedangkan, ada pula aktivis Islam yang kecenderungannya hampir tidak jauh berbeda dengan model yang pertama, hanya saja aktivis tipikal ini lahir dari ormas Islam yang sudah cukup mapan, seperti DDII, LDII, Persis, SI, al-Wasliyah dan Jamaah Tabligh. Sementara, mereka aktivis Islam yang lebih toleran dan fleksibel, lazimnya muncul dari ormas Islam yang sudah cukup mapan, yang tradisi serta budayanya sudah sedemikian menyatu dalam kehidupan masyarakat Islam pada umumnya seperti NU dan Muhammadiyah. Maka sudah dapat diketahui bahwa betapa respon aktivis Islam terhadap persoalan sosial, politik dan ekonomi, sangat memiliki kekhasan tersendiri, dalam pengertian, terdapat perbedaan di antara sekian aktivis gerakan Islam baik dalam mewacanakan pendapat serta gagasannya, maupun ekspresi politiknya ketika hendak mengaspirasikannya di hadapan negara.

Dalam konteks ini, sebenarnya masih selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya oleh Ahmad Baso ketika membahas perihal diskursus *civil society*. Ada yang berpendapat bahwa genealogi masyarakat sipil lahir dari sebetuk pemikiran sekuler dari Barat, sementara jika masyarakat Islam ingin mengadopsinya maka harus menyesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan Islam. Namun ada pula yang berpendapat bahwa genealogi masyarakat sipil sebenarnya sudah ada dalam sejarah peradaban Islam. Jika ingin mengadopsinya maka masyarakat Islam tinggal mengkontekstualisasikannya saja dalam

kehidupan mereka yang sebenarnya.¹

Perbedaan pandangan, gagasan, ekspresi maupun tindakan ketika aktivis Islam merespon persoalan sosial, politik dan ekonomi kontemporer, lebih dikarenakan semenjak dulu peta gerakan Islam atau masyarakat Islam di Indonesia sangat beragam dan multikultural. Itulah banyak peneliti mengatakan bahwa Islam Indonesia sangat warna-warni atau tidak tunggal.² Maka kategorisasi serta klasifikasi terhadap gagasan, pemikiran, ekspresi serta tindakan dari aktivis Islam menyangkut persoalan sosial, politik dan ekonomi kontemporer perlu untuk dilakukan sehingga pemetaan gagasan, pemikiran, ekspresi dan tindakan dari mereka aktivis Islam bisa diakomodasi ke dalam *frame* pemikiran yang lebih terintegrasikan dan *sustainable*. Sehingga dari sekian perbedaan itu bukan malah tampak terfragmentasi, melainkan sebetulnya integrasi pemikiran yang bisa memberi kontribusi serta solusi terhadap persoalan-persoalan kenegaraan.

Islam, Politik dan Demokrasi Indonesia Orde (tanpa) Orde

Semenjak reformasi tahun 1998, bisa dikatakan aspirasi politik masyarakat Islam kian terbuka dan tumbuh dalam peta politik nasional. Kebebasan individu di zaman reformasi menambah keberanian dalam jati diri masyarakat Islam yang diwakili oleh mereka aktivis dari gerakan Islam. Perdebatan di seputar apakah negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila serta menganut sistem demokrasi masih harus dipertahankan pascareformasi tahun 1998, seolah menjadi daya tarik tersendiri di kalangan aktivis Islam. Terlebih lagi wacana itu dilegitimasi oleh krisis yang datang bertubi-tubi, sementara negara seakan tak berdaya menghadapinya dan krisis masih terjadi di berbagai bidang.

Dari sebagian aktivis Islam, khususnya aktivis yang terkategori

¹ Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

² Misalnya, lihat karya John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, (New York:Oxford University Press, 1996).

reaksioner dan cenderung *emob* pada negara, menyebutkan bahwa integrasi politik nasional harusnya tidak disatukan oleh ideologi Pancasila karena ideologi itu kurang memiliki akar dan kekhasan yang kuat dalam masyarakat Indonesia umumnya. Lagipula, sebagai akibat dari kebijakan negara yang keluar dari akar-akar tradisi, kebudayaan, serta pemikiran Islam akhirnya krisis di berbagai bidang tak bisa terelakkan lagi. Dari kalangan aktivis tipikal ini, meyakini bahwa dengan kembali pada akar-akar tradisi, kebudayaan dan pemikiran Islam yang khas dan murnilah Indonesia akan bisa terangkat dari krisis multidimensi.

Demikian pula dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, bagi aktivis Islam tipikal ini, sistem itu tidak memiliki kekhasan yang kuat dan murni dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia karena sistem itu terlalu mengadopsi pemikiran Barat sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi, kebudayaan dan pemikiran Islam khususnya. Sistem jenis itu adalah buatan akal manusia yang memiliki sejumlah kelemahan, apalagi berjalin kelindan dengan kepentingan kapitalisme Barat (Amerika dan sekutunya). Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang mengadopsinya—seperti Indonesia—tak akan bisa keluar dari krisis selama masih menggunakan sistem tersebut, bahkan malah terjerumus ke dalam jeratan kapitalisme Barat.

Adapun solusi dalam merespon wacana ideologi nasional, demokrasi dan tata nilai sekuler yang dianut negara-bangsa ini, aktivis Islam yang cenderung reaksioner dan membangkang pada negara, intinya terintegrasi dengan pemikiran *ushuliyah* Islam (fundamentalisasi pemikiran Islam) yang bersumber dari al-Qur'an dan *sunnah* khususnya, sementara jika tidak terdapat dari dua sumber itu maka akan dirujuk dari tradisi dan kebudayaan *salaf al-Shalih* (para pendahulu Islam yang baik). Konsep negara Islam zaman *khilafah Islamiyyah*, konsep *syura* (kesepakatan *common platform*) dan pemikiran-pemikiran mengenai dasar-dasar kenegaraan pada zaman Nabi Muhammad di Madinah, akhirnya dianggap menjadi solusi tepat dalam wacana yang dikembangkan oleh para aktivis Islam tipikal ini.

Persis seperti analisis Bassam Tibi yang menyebutkan bahwa sebagai bentuk respon atas ketidakberdayaan negara dan ketidakadilan globalisasi Barat akhirnya dalam masyarakat Islam itu akan lahir sebetulnya gerakan yang cukup masif yang mencoba menawarkan supaya kembali pada ajaran-ajaran fundamental agama. Menurut Tibi, gerakan fundamentalisme Islam, merupakan respon atas ketidakadilan global yang masuk dalam negara-negara dengan mayoritas penduduknya Muslim. Gerakan fundamentalisme Islam yang salah satunya memiliki ciri-ciri literalistik dalam mendekati teks-teks keagamaan, berbeda dengan gerakan fundamentalisme keagamaan lainnya, misalnya Hindu, yang hanya berkembang di negara tempat lahirnya, India. Sedangkan fundamentalisme Islam bersifat transnasional, tak hanya lahir di satu negara, melainkan *spirit*-nya berkembang lintas negara (secara global).³

Namun, tak semua aktivis Islam sepakat dengan konsep-konsep yang dikembangkan dan diwacanakan dari aktivis Islam jenis pertama itu. Aktivis Islam jenis kedua ini lazimnya lebih toleran, fleksibel dan cenderung *sustainable* dengan nilai-nilai pemikiran yang selama ini dikembangkan oleh negara. Aktivis tipikal kedua lebih cenderung memberi kontribusi dan masukan solusi pada negara, yang meskipun dirujuk dari teks-teks keagamaan Islam, namun pada intinya perdebatan mengenai ideologi Pancasila dan sistem demokrasi telah dianggap satu keputusan final yang tak bisa diganggu gugat. Dengan demikian, meskipun Islam menjadi rujukan pemikiran bagi mereka, ruang lingkup yang lahir dan muncul dari ajaran Islam bukannya tak bisa masuk dalam peta pemikiran politik nasional, namun justru Islam menjadi *spirit* yang memberi gairah-gairah baru bagi pemikiran negara yang mungkin tengah mengalami kebuntuan dan kemacetan.

Konsep antara Islam dan demokrasi, dianggap tak bertentangan, malah sumber-sumber dari ajaran Islam digali secara mendalam sehingga

³ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, terj. Imron Rosyidi dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 25.

menghasilkan sebuah kerangka berpikir antara demokrasi dan Islam yang sangat *comfortable* dan berkesesuaian (*to agree within*). Demokrasi, bagi aktivis Islam tipikal ini, bukanlah produk Barat dan hanya bisa berlaku di dunia Barat. Demokrasi bukanlah dimiliki dan diklaim secara sepihak oleh Barat, namun ia merupakan produk universal bagi tatanan kemanusiaan, termasuk bagi masyarakat Islam itu sendiri. Demokrasi merupakan tata nilai yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena dalam demokrasi terdapat nilai keadilan yang dalam Islam juga diajarkan sebagai dasar dan inti ajaran Islam yang mengajarkan keadilan juga. Pun demokrasi bukan tujuan, tapi dalam sistem kehidupan masyarakat dan negara yang paling mendekati dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan hanyalah sistem tersebut.

Cara pandang yang diusung oleh aktivis tipikal ini mengenai demokrasi, sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan fondasinya sudah dikembangkan oleh beberapa pemikir pembaru Islam, seperti gagasan Rachid Ghannouchi, yang menyebutkan bahwa meskipun dalam dunia Islam terdapat gagasan mengenai sistem kenegaraan, namun pada intinya masyarakat Muslim tak menggunakannya dalam bentuk tata kenegaraan mereka, melainkan lebih memilih sistem-sistem yang sudah baku dan berlaku umum, seperti demokrasi. Apalagi, gagasan mengenai Islam dan demokrasi terasa menempati posisinya yang elegan Pascaperang Dingin hingga pergantian millennium baru semenjak tahun 2000 yang dibuktikan oleh laporan *Freedom in the World 2000*.⁴

Perdebatan di kalangan aktivis Islam mengenai dasar negara, konsep demokrasi dan politik di Indonesia, menjadi kian terbuka, terutama terjadi semenjak reformasi bergulir bahkan hingga kini, di mana partisipasi politik umat Islam terasa menemukan kembali bentuknya setelah sebelumnya

⁴ Rachid Ghannouchi, "Partisipasi dalam Pemerintahan Non-Muslim", dalam Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 112. Bandingkan juga dengan karya Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Singapura: Solstice Publishing, 2006).

rezim Orde Baru berhasil menekan dan membungkam aspirasi politiknya selama 32 tahun lebih. Bola perdebatan itu terus bergulir hingga kini, seiring peran negara belum menemukan bentuk formulasi bagi perubahan dan penyelesaian krisis yang berkepanjangan.

Sementara itu, fragmentasi politik dalam masyarakat Muslim justru semakin meluas, dalam pengertian, justru karena reformasi dan keterbukaan itulah integrasi politik masyarakat Muslim tak bisa terjadi, yang ada di antara para aktivisnya satu sama lain saling menuding dan mengklaim bahwa aliran dan sekte politiknyalah yang paling baik di antara yang lainnya. Aktivis FPI, misalnya menganggap praktik politik HTI tidaklah cukup rasional. Begitupula sebaliknya, aktivis HTI menganggap partai-partai politik Islam yang ada semuanya tidak mengaspirasikan Islam dan masyarakat Muslim. Hanya HTI-lah, menurut mereka, satu-satunya ormas dan partai politik yang mengaspirasikan Islam dan masyarakat Muslim. Fragmentasi di kalangan aktivis dan gerakan Islam juga terjadi dalam lingkup metode dakwahnya, dakwah HTI berbeda dengan model dakwah FPI dan Gerakan Tarbiyah.

Sementara dalam lingkaran aktivis Islam yang “reaksioner” itu selain saling mendelegitimasi satu sama lain, mereka juga menganggap bahwa negara dalam konteks sekarang, tak dianggap sebagai Orde Reformasi, melainkan sebuah orde (tanpa) orde lantaran mengalami kelimbungan yang luar biasa. Oleh sebab itulah, para aktivis Islam mencari formulasi bagi kelangsungan negara dan bangsa ini. Di satu sisi, ada yang masih pro dengan kebijakan-kebijakan negara, tapi di sisi lain ada juga yang mencoba keluar dari *mainstream* dan mencoba menawarkan gagasan dan pemikiran baru dalam politik di Indonesia. Meskipun aktivis tipikal reaksioner masih sangat perifer, namun bukan tak mungkin gerakan kultural yang dibangun oleh mereka menjadi lebih masif seiring dengan kondisi negara yang masih limbung. Maka sudah sepatutnya gerakan dan eksistensi mereka tidak dipandang sebelah mata.

Pergeseran Sosial Islam ke Arah Fundamentalisme

Seiring berlangsungnya iklim perubahan yang dimulai sejak reformasi, nilai-nilai Islam (sebagai *ushuliyah*) menjadi perbincangan dan prinsip yang lebih mengakar dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya apa yang selama ini disebut sebagai tumbuhnya gerakan keagamaan yang cenderung fanatis dan fundamentalistik. Pemahaman yang fundamentalistik kian hari semakin tumbuh dalam idealisme sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Bahkan pemahaman itu kemudian menjadi semacam gerakan masif yang melandasi munculnya ormas-ormas keislaman baru. Ormas-ormas keislaman lama dalam wacana politik nasional menjadi semakin termarginalkan karena digantikan oleh kemunculan ormas keislaman baru yang menghiasi media-media massa.

Meskipun pemahaman fundamentalistik dalam peta sosial masyarakat Islam terasa semakin tumbuh, terutama karena kemunculannya yang menghiasi media-media massa, namun menurut Azyumardi Azra, kaum Muslim yang memiliki pemahaman seperti itu, maupun mereka yang tergabung dalam ormas-ormas Islam yang boleh dikatakan sebagai gerakan fundamentalis, tetap saja hanyalah gerakan periferal dalam masyarakat Islam Indonesia secara menyeluruh. Pada intinya ciri Muslim Indonesia (masih) tetap moderat, dalam pengertian tetap menjalankan syariat Islam sehari-hari. Bagi mereka, syariat tidak harus distrukturasi ke dalam bentuk aturan kenegaraan yang resmi, akan tetapi dipahami sebagai aturan kultural masyarakat Islam semata, seperti menjalankan salat setiap hari lima kali, menjalankan puasa di Bulan Ramadan, melakukan haji, menunaikan zakat dan seterusnya.⁵

Namun, periferalisasi aktivis maupun ormas Islam yang dikategorisasi sebagai gerakan fundamentalis itu, jika terus dibiarkan boleh jadi akan terus bertambah dan ideologisasinya bisa terus membumi dalam masyarakat Islam di Indonesia secara menyeluruh. Mengingat, penelitian yang sudah dilakukan tentang fenomena fundamentalisme

⁵ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy...*, h. 55.

Islam selama ini masih berkuat pada masyarakat Muslim perkotaan (*urban society*),⁶ sedangkan di wilayah pedesaan justru kurang tersentuh. Jika terus dibiarkan bukan mustahil ideologisasi gerakannya bisa masuk di wilayah-wilayah Muslim pedesaan dan pesantren-pesantren. Paling tidak ada tiga modus, bagaimana pemahaman fundamentalistik dari perkotaan itu bisa masuk di wilayah-wilayah pedesaan dan pesantren.

Pertama, melalui media massa. Dengan menggunakan media massa, mereka mengemas tema dan wacana yang menarik perhatian banyak kalangan Islam sehingga bisa dengan mudah menyebar dan memengaruhi cara berpikir masyarakat Islam menuju pada cara berpikir yang fanatis dan fundamentalistik. *Kedua*, melalui dakwah-dakwah yang menyebar di ruang-ruang pendidikan, baik di sekolah, kampus maupun pesantren. Pola transmisi ideologis aktivis dan gerakan fundamentalis ialah melalui jalur-jalur kultural di bidang pendidikan. *Ketiga*, melalui aktivitas politik, yakni dengan masuk dalam kancah dunia politik partai. Pola aktivitas politik yang dilakukan biasanya menyusupkan misi ideologis-politisnya melalui kegiatan-kegiatan dakwah yang mampu memasuki ruang-ruang publik masyarakat Islam secara lebih luas.

Pemahaman fundamentalistik, terutama yang selama ini diusung oleh para aktivis Islam fundamentalis, misalnya menganggap negara tak bisa menyelesaikan problematika krisis sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, “penyakit masyarakat” (prostitusi, diskotik, penyalahgunaan Narkoba) dan tidak memberlakukan aturan-aturan yang berangkat dari ajaran Islam. Oleh karenanya, menurut mereka negara mestinya kembali pada sumber dan *spirit* ajaran Islam, jika menginginkan perubahan yang signifikan bagi pengentasan masalah sosial tersebut.

Para aktivis Islam fundamentalis juga menganggap, negara tak mengaspirasikan faktor Islam dalam kebijakan publik. Faktor Islam dianggap dimarginalisasikan oleh negara, baik dalam kehidupan nasional

⁶ M. Imdadun Rahmat, et.al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003).

bahkan internasional. Sebaliknya, negara dianggap terlalu mengakomodasi kepentingan-kepentingan Barat. Menurut Azyumardi Azra, faktor Islam yang dimarginalisasikan oleh negara, baik di tingkat nasional maupun internasional, terjadi akibat para pembuat kebijakan (*decision maker*) dalam negara itu sendiri diorganisasi oleh para birokrat yang lazimnya lahir dari kalangan politik yang bergaris nasionalis sekuler atau politikus yang berangkat dari agama tertentu selain Islam.⁷

Oleh karena itu, “keberpihakan” negara, misalnya dalam kasus-kasus kekerasan di berbagai daerah seperti di Poso, Ambon, Aceh dan sebagainya, yang melibatkan masyarakat Islam dengan masyarakat Kristen maupun militer, menurut aktivis Islam fundamentalis, terjadi karena dalam negara itu sendiri terdapat para birokrat yang terkristalisasi menyudutkan Islam. Mereka “kaum kafir/salibis” tidak senang dengan perkembangan Islam di daerah-daerah seperti Poso, Ambon dan sebagainya sehingga jalan satu-satunya untuk meredam perkembangan Islam adalah dengan membuat kerusuhan sosial.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh George Junus Aditjondro, negara juga memiliki kepentingan politik di daerah-daerah konflik tersebut. Begitu pula menurut Thamrin Amal Tomagola, proposisi para pemimpin di daerah yang menginginkan konflik masih jauh lebih besar, ketimbang para pemimpin di daerah yang menginginkan damai. Hal itu terjadi karena dengan adanya konflik maka “produksi ekonomi” yang dihasilkan dari konflik tersebut jumlahnya sangat besar, baik karena proyek-proyek damai yang nanti akan diberikan oleh negara, maupun bisnis-bisnis lain yang timbul karena adanya konflik tersebut.⁸

Oleh sebab itulah, integrasi sosial masyarakat Islam dalam soal kasus-kasus kekerasan di berbagai daerah yang melibatkan masyarakat Islam di sana, pada intinya bisa terjadi. Meskipun pemahaman dan praktik tindakannya saja yang berbeda, namun integrasi sosialnya berhasil terjadi.

⁷ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy...*, h. 89.

⁸ Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso* (Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007).

Misalnya, antara aktivis NU, Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah dan aktivis FPI, HTI serta Gerakan Tarbiyah, integrasi sosial mereka dalam melihat kasus kekerasan itu sangat solid, bahwa semua aktivis Islam merasa prihatin dalam melihat masyarakat Islam di daerah konflik. Maka dari itu, harus dibantu baik secara diplomasi, moral maupun material. Yang membedakan di antara mereka, aktivis FPI, misalnya merasa terpanggil untuk langsung terjun ke lapangan membantu masyarakat Islam di daerah konflik, sedangkan bagi aktivis NU atau Muhammadiyah, berupaya melakukan konsolidasi, pengkajian mendalam, serta diplomasi dengan negara dan seterusnya dalam melihat konflik tersebut.

Dengan demikian, terjadinya pergeseran sosial Islam yang menuju ke arah fundamentalisme, terpicu karena beberapa hal. *Pertama*, karena ketidakpercayaan terhadap negara. Negara dianggap sangat korup karena dijalankan oleh roda birokrasi yang sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Korupsi sebagai sumber mala petaka dan krisis yang dialami bangsa Indonesia. *Kedua*, karena Islam tidak menjadi faktor signifikan dalam strukturasi negara. Islam tidak dianggap sebagai sumber dan *spirit* bagi penyelesaian berbagai krisis yang menimpa bangsa ini. Sehingga terjadinya penyakit-penyakit sosial yang melanda masyarakat, kian hari kian tumbuh subur karena tidak adanya tindakan tegas dari negara. *Ketiga*, negara terlalu mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari Barat (Amerika dan sekutunya) baik dalam persoalan sistem kenegaraan, demokrasi, campur tangan ekonomi dan seterusnya. Sedangkan di sisi lain, antara kepentingan Barat dan masyarakat Islam di Indonesia umumnya selalu terjadi kutub biner. Tatanan nilai dari Barat, juga diyakini turut menyebarkan nilai-nilai yang amoral dalam masyarakat Islam khususnya.

Pada intinya, respon aktivis Islam secara menyeluruh terhadap persoalan sosial sangat pro pada perubahan, namun perubahan yang dimaksud tidak dipahami tunggal, melainkan setiap aktivis Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai apa dan bagaimana perubahan itu harus digagas dan dijalankan. Justru yang dikhawatirkan, dari sebagian aktivis

Islam yang menginginkan perubahan itu menganggap bahwa semuanya harus kembali pada sumber-sumber ajaran Islam dan menafikan keragaman bangsa Indonesia yang pluralis dan multikultural.

Kecenderungan semacam itu sudah mulai tumbuh dalam masyarakat Islam, meskipun masih bersifat perifer, namun harus diredam serta diluruskan pemahamannya sebab bagaimanapun bangsa Indonesia tidaklah homogen karena dimukimi oleh beragam etnis, suku bangsa, agama yang berbeda-beda. Justru pemahaman Islam yang berwawasan nasional yang semestinya harus dikembangkan sebab aktivis Islam yang demikian dapat memberi kontribusi yang riil terhadap persoalan sosial-kenegaraan yang terjadi dalam tubuh bangsa ini.

Penolakan terhadap Globalisasi, Kapitalisme dan Agen Ekonomi Barat

Tesis Bassam Tibi yang menyebutkan bahwa lahirnya gerakan fundamentalisme Islam salah satunya diakibatkan karena penolakan (resistensi) terhadap globalisasi, tampaknya masih sangat relevan untuk menjawab persoalan ini.⁹ Globalisasi bukan hanya ditolak di dunia Islam karena praktiknya dalam kehidupan sosial, melainkan semenjak semula masyarakat Islam sudah terlanjur negatif terhadap suatu hal yang datang dari Barat. Segala produk yang datang dari Barat, terutama dalam pandangan aktivis Islam yang cenderung memiliki pemahaman fundamentalistik, akan ditolak mentah-mentah. Kompromisasi terhadap produk-produk globalisasi dari Barat, sama dengan sebetulnya hipokrisi, yang menurut mereka, bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh sebab itu pula, sebenarnya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan negara-negara Barat (Amerika dan sekutunya) selalu mendapat tentangan dari aktivis Islam tipikal itu. Kerjasama dengan negara-negara Barat diyakini tak akan mendapat berkah serta keuntungan bagi negara ini, yang ada hanyalah eksploitasi yang ekstrem terhadap kekayaan alam Indonesia. Respon yang dilakukan oleh aktivis HTI,

⁹ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme...*, h. 30.

misalnya selalu menekankan supaya jangan sampai negara ini melakukan kerjasama dalam bentuk apa pun, terutama kerjasama ekonomi, dengan negara-negara Barat karena yang terjadi sebentar eksploitasi kekayaan alam, seperti di Freeport, kasus Exxon Mobil dan seterusnya.

Sebaliknya, aktivis Islam tipikal itu menyarankan kepada negara, supaya bekerjasama dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Brunai, Malaysia, Mesir, Palestina, Iran dan seterusnya. Selain secara kultural, antara negara-negara Islam tersebut dan negara Indonesia sama-sama memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas Islam, juga karena kedekatan kebudayaan yang pada intinya berangkat dari kebudayaan Islam sehingga diharapkan bentuk kerjasama ekonomi pun akan berpatokan pada dimensi keadilan, bukan eksploitasi.

Hubungan antara aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik dan perwakilan negara-negara Barat di Indonesia jelas terjadi demarkasi yang cukup diametral. Bahkan sejumlah kegiatan asing yang beroperasi di Indonesia, mendapat perhatian tersendiri oleh aktivis Islam semacam itu. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM-LSM di Indonesia, baik yang berorientasi pada sosial maupun keagamaan, yang kerjasamanya dilakukan dengan lembaga-lembaga *think-thank* Amerika dan sekutunya, seperti TAF, Asia Foundation dan seterusnya, selalu dicurigai sebagai agen-agen Barat untuk mencari informasi tentang seluk-beluk Islam dan keindonesiaan.

Itulah sebabnya, pengalaman sebagai peneliti ketika melakukan wawancara dengan para tokoh maupun aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik, selalu akan menanyakan kepada peneliti perihal untuk apa dan siapa yang berada di balik penelitian itu? Kadang stereotip yang membabi-butakan langsung ditujukan sehingga narasumber yang akan diwawancarainya sontak akan menolak. Atau bahkan tak hanya menolak untuk diwawancarai, tapi juga mencurigai bahwa peneliti yang akan mewawancarai tersebut adalah benar-benar agen asing. Mereka bisa jadi akan bertanya, “Anda anak buah Sydney Jones ya?”

Keberadaan aktivis dari gerakan Islam semacam itulah, yang mungkin, membuat pemerintah Amerika merasa curiga dan perlu bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan prevensi terhadap gerakan Islam garis keras maupun teroris yang selama ini selalu membuat huru-hara dan kecemasan. Pemerintah Amerika merasa Indonesia merupakan ladang bagi gerakan radikal yang akan melahirkan para teroris sehingga perlu untuk mengintervensi membuat kurikulum bagi sekolah-sekolah Islam maupun pesantren supaya pandangan-pandangan keagamaannya menjadi lebih terbuka.

Sebagian kalangan menyebutkan bahwa pemerintah Amerika salah alamat jika mengaitkan terorisme dengan Islam, terutama masyarakat Islam di Indonesia. Karena masyarakat Islam Indonesia sangat toleran, ramah dan moderat. Kalaupun ada masyarakat Islam yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme, hal itu hanyalah praktik menyimpang dari ajaran Islam¹⁰ dan biasanya pelakunya terkait dengan modus-modus kepentingan ekonomi.¹¹ Tak ada akar-akar kekerasan dalam masyarakat Muslim di Indonesia sebab dalam sejarah masuknya Islam pertama kali di bumi Nusantara ialah melalui dakwah dan perdagangan. Hal demikian berbeda dengan kondisi penyebaran Islam di Timur Tengah yang dilakukan dengan cara ekspedisi militer para pahlawan-pahlawan Islam.

Aktivis Islam secara generik dalam persoalan ekonomi menolak jika harus kerjasama dengan agen-agen kapitalisme Barat. Sebisa mungkin, negara tak melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Barat. Kondisi itu berbeda dengan aktivis Islam liberal di Indonesia, yang cenderung lebih *open minded* dan menerima gagasan-gagasan ekonomi liberal Barat. Bahkan dalam hal ini, ada *jokes* tersendiri yang dibuat kalangan liberal yang ditujukan kepada aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik: “Kapitalisme haram, tapi dolarnya halal.”

¹⁰ Bruce B. Lawrence, *Menepis Mito: Islam di Balik Kekerasan?* terj. Harimukti Bagoes Oka (Jakarta: Serambi, 2002), h. 10.

¹¹ M. Syafii Anwar, “Menggali Akar Kekerasan Atas Nama Agama”, *Makalah*, Seminar Center for Moderate Muslim, 2005.

Di samping itu, IMF dan World Bank biasanya adalah dua institusi yang pertama kali dituding oleh para aktivis Islam Kanan sebagai *biang kerok* penyebab keterpurukan ekonomi. Sebab dari dua lembaga itulah menurut mereka negara terlibat utang yang tak ada putusnya. Maka pemutusan hubungan dengan dua institusi itu, bagi mereka harus segera dilakukan oleh negara. Begitu pula, negara harus keluar dari keanggotaan APEC, GAT, kebijakan *Freetrade* atau apa pun modus ekonomi yang bersumber dari Barat.

Ketidapercayaan terhadap Barat, sebenarnya bukan hanya diyakini bahwa segala bentuk kerjasama pasti akan merugikan bangsa ini, melainkan karena sentimen ideologis-keagamaan, di mana tesis benturan antarperadaban di sini menjadi berlaku. Bangsa Barat adalah peradaban Yahudi-Kristiani yang sedari dulu sudah bermusuhan dengan Islam yang dipicu ketidakrelaan agama Islam menjadi besar. Hal itu kemudian dilandasi pula dengan keberadaan teks kitab suci yang kurang lebih menyebutkan bahwa, “Kaum Yahudi dan Nasrani tak akan rela kepada kaum Muslim hingga kaum Muslim mengikuti *millah* mereka” (Q.S. 2: 120).

Kesadaran ideologis-keagamaan itulah yang sebenarnya menjadi titik mula (*starting point*) yang kemudian menimbulkan krisis kepercayaan aktivis Islam terhadap segala hal yang datang dari Barat. Bahkan sebuah botol pun karena produk Barat akan dikategorisasikan sebagai barang yang haram. Pandangan subjektif itu terjadi bukan karena botol adalah barang yang haram, melainkan karena semenjak awal pandangan mereka sudah terjebak dalam fundamentalistik dan stereotip negatif.

Keadaan itu berbeda cara pandang mereka dalam melihat realitas masyarakat Arab yang selalu positif. Alasannya lantaran Islam pertama kali datang dari sana sehingga antara Islam dan Arab tak bisa dipisahkan. Dampaknya, segala produknya pun akan dikatakan halal, termasuk mengimpor budaya dan tradisinya adalah keharusan yang tak bisa dibantah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelaahan literatur dan pengamatan penulis di lapangan tentang respon aktivis gerakan Islam terhadap persoalan sosial, politik dan ekonomi kontemporer ini maka ada beberapa kesimpulan: *pertama*, aktivis dari gerakan Islam kini harus dikategorisasikan lagi, mengingat semenjak reformasi tahun 1998 sampai sekarang iklim sosial-politik sudah berbeda. Pada intinya, aktivis gerakan Islam yang baru cenderung reaksioner, bahkan ada yang menyebut “kaki tangan” dari gerakan Wahabi di Arab Saudi. Munculnya beragam aktivis dari gerakan Islam baru itu, berbeda dalam hal pandangan politik dan pendekatan dakwahnya. HTI, misalnya berbeda dengan gerakan Tarbiyah seperti PKS, begitu juga keduanya berbeda dengan FPI.

Kedua, aktivis dari gerakan Islam lama seperti DDII, LDII, SI, al-Washliyah, memang sama reaksionernya dengan aktivis dari gerakan Islam yang baru, namun yang membedakannya bahwa aktivis dari gerakan ini pada intinya tidak mengaktualisasikan diri dalam bentuk politik praktis, seperti membuat partai atau melakukan tindakan anarkis-militan di lapangan. Namun dalam konteks pandangan keagamaan, politik dan dakwahnya tidak jauh berbeda dan intinya menginginkan tegaknya Islam di bumi Nusantara.

Ketiga, agak berbeda dengan aktivis dari gerakan Islam di atas, aktivis dari NU dan Muhammadiyah memiliki corak dan dinamikanya tersendiri, yang pada intinya sepakat dengan ideologi negara. Meskipun mengkritik kebijakan negara, namun masih dalam bingkai keindonesiaan seperti yang selama ini dipahami. Integrasi politik masyarakat NU dan Muhammadiyah dengan negara, umumnya terpelihara karena secara historis kedua ormas itu adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berpolitik, walaupun berpolitik tidak atas nama institusi melainkan atas nama individu. Oleh sebab itulah, sebenarnya akar-akar kemoderatan Islam Indonesia lahir dari kedua ormas ini.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus, dan Thamrin Amal Tomagola, dalam Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007.
- Anwar, M. Syafii, “Menggalai Akar Kekerasan Atas Nama Agama”, *Makalah Kerja*, Seminar Center for Moderate Muslim, 2005.
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context*, Singapura: Solstice Publishing, 2006.
- Baso, Ahmad, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Esposito, John L., dan O. Voll, *Islam and Democracy*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Ghannouchi, Rachid, “Partisipasi dalam Pemerintahan Non-Muslim”, dalam Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Lawrence, Bruce B., *Menepis Mitos: Islam di Balik Kekerasan?* terj. Harimukti Bagoes Oka, Jakarta: Serambi, 2002.
- Rahmat, M. Imdadun, et.al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, terj. Imron Rosyidi dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.